



SUMBER BERITA

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAKYAT BENGKULU | <input type="checkbox"/> | MEDIA INDONESIA |
| <input type="checkbox"/> | BENGKULU EKSPRESS | <input type="checkbox"/> | KOMPAS |
| <input type="checkbox"/> | RADAR BENGKULU | <input type="checkbox"/> | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Ditangani Jaksa, 4 Tornas Dikembalikan

BENTENG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Benteng melakukan pemanggilan beberapa ASN dan pensiunan ASN Benteng, kemarin (11/10). Mereka dipanggil karena masih menguasai kendaraan dinas dan wajib pajak (WP) yang menunggak pembayaran pajak daerah, dan PBB.

Kejari Benteng, Tri Widodo, SH, MH melalui Kasi Pendataan dan Tata Usaha, Bertha Camelia, SH, MH menjelaskan, dalam pemanggilan yang dilakukan kemarin, sudah ada yang mengembalikan sepeda motor dinas (tornas) ke Bidang Aset BKD Benteng.

"Dari SLK yang kita terima ada delapan tornas yang belum dikembalikan, namun saat ini (kemarin, red) sudah ada empat tornas yang dikembalikan. Terdiri dari motor Yamaha Jupiter Z dari Amrullah, motor Kawasaki KLX dari Edi Bakhtiar, motor Honda dari Ismail Bakaria dan motor Kawasaki KLX dari Rendra Revana Putra," jelas Bertha.

Lanjutnya, masih ada empat tornas lagi yang belum dikembalikan, seperti Yamaha Vixion yang dipegang Jarunadi, Kawasaki KLX dipegang Aidil Razak, dua unit Kawasaki KLX dipegang Harry Wahyudi. Dari empat unit Tornas yang belum dikembalikan ini, Aidil Razak akan mengembalikan tornas tersebut hari ini.

"Sedangkan Jarunadi dan Harry

Wahyudi hingga saat ini belum ada kejelasan dan akan kita proses terus hingga yang bersangkutan mengembalikan tornas yang menjadi aset Pemkab Benteng tersebut," terangnya.

Selain aset, Kejari juga melakukan pemanggilan terhadap enam WP yang menunggak pajak hotel, pajak pajak mineral dan batuan bukan logam dan PBB. Namun dari enam WP yang dipanggil, hanya manajemen Hotel Dianti yang memenuhi pemanggilan Kejari Benteng. Sedangkan lima WP lagi tidak hadir tanpa kejelasan.

"Hotel Dianti belum membayar pajak hotel karena dari penghasilan saja sudah tidak bisa menutupi biaya operasional. Untuk lima WP ini akan kita jadwalkan pemanggilan yang kedua. Namun kita berharap sebelum pemanggilan kedua, semua persoalan ini bisa kita selesaikan

dan uang negara bisa kita selamatkan," ungkap Bertha.

Sejumlah tunggakan pajak WP terhadap Pemkab Benteng yakni PT PLN Persero menunggak PBB sejak tahun 2020 hingga 2021 dengan total tagihan sebesar Rp 157 juta, PT Waskita Karya menunggak PBB sejak tahun 2013 hingga 2021 dengan total tagihan Rp 41 juta, CV Trio Karya menunggak pajak dari tahun 2013 hingga 2021 dengan total tagihan Rp 107 juta, Hotel Dianti menunggak pajak hotel tahun 2015 sebesar Rp 9,6 juta, dan PT Bengkulu Mandiri menunggak pajak mineral dan batuan bukan logam tahun 2013 sebesar Rp 102 juta. "Jika ditotalkan keseluruhan SKK yang diberikan kepada kita, baik itu dari aset Pemkab hingga utang pajak para WP, total uang negara yang harus kita selamatkan Rp 642 juta," beber Bertha. (je)